

Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Daerah Karesidenan Surakarta Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat

Aprilia Risti Juwita

Program Studi Ilmu Ekonomi

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

ABSTRAK

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah pada pengelolaan keuangan daerah, untuk itu efisiensi pengelolaan keuangan daerah diperlukan sehingga tidak terjadi pemborosan dan tepat sasaran dalam pengalokasiannya, hal ini dilakukan agar tercapainya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi pengelolaan pendapatan daerah Karesidenan Surakarta dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dimana dalam operasinya menggunakan variabel input yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah, dan menggunakan variabel output yaitu Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung melalui PDRB, Presentase Penduduk Tidak Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan. Hasil dari penelitian ini adalah, pada tahun 2015 terdapat tiga daerah dengan efisiensi kurang dari 100%, kemudian pada tahun 2016 dan 2017 berkurang menjadi dua daerah.

Kata Kunci : *Data Envelopment Analysis (DEA)*, Pembangunan Ekonomi, Efisiensi, Inefisiensi

ABSTRACT

One important aspect in the implementation of regional autonomy is the management of regional finance, for which the efficiency of regional financial management is needed so that there is no waste and is targeted at its allocation, this is done to achieve regional development and community welfare. This study aims to determine the efficiency of Surakarta City Residency revenue management in achieving community welfare. In this study using the Data Envelopment Analysis (DEA) analysis method in which the operation uses input variables namely Regional Original Income (PAD), Balancing Funds, Other Legitimate Income, and uses output variables namely Economic Growth calculated through GRDP, Population Percentage Not Poor and Human Development Index (HDI) as an indicator of well-being. The results of this study are, in 2015 there were three regions with efficiency of less than 100%, then in 2016 and 2017 it reduced to two regions.

Keywords: Data Envelopment Analysis (DEA), Economic Development, Efficiency, Inefficiency

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan aspek indikasi dari pembangunan ekonomi dalam proses pertumbuhan ekonomi tersebut. Salah satu indikasi yang digerakkan oleh para ahli ekonomi guna melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu bangsa atau penduduk suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut didistribusikan dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi tetapi seberapa jauh pembangunan telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut Sadono (2012), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Melalui proses pertumbuhan

ekonomi akan tercermin kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh suatu bangsa atau penduduk suatu daerah dalam periode tertentu.

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sadono, 2012). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses usaha dan tindakan nyata pemerintah daerah bersinergi dengan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Dalam implementasi perencanaan daerah, ternyata banyak masalah muncul, yaitu perencanaan terlalu memfokuskan diri pada anggaran dan proyek pembangunan daripada memandang anggaran secara keseluruhan (World Bank, 2003). Menurut Sjafrizal (2014), analisis tentang struktur ekonomi daerah diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar menentukan arah umum pembangunan daerah. Lebih lanjut, analisis tentang struktur ekonomi daerah juga dapat

digunakan sektor-sektor untuk mengetahui tingkat kemajuan pembangunan dengan melihat pada kemajuan perubahan struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya, kemampuan untuk memacu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing ekonomi di wilayahnya.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan dan sumberdaya fisik daerah. Setiap pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam pencapaian tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus memiliki inisiatif pembangunan daerah dan menaksir potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Efisiensi merupakan kunci yang tepat untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar dapat dikelola atau dialokasikan ke sektor-sektor tertentu dengan harapan dapat meningkatkan hasil yang baik dalam tahapan pembangunan suatu daerah. Efisiensi pengeluaran pemerintah dapat tercapai jika hasil dari sumber daya

yang ada dapat dioptimalkan dalam pengalokasiannya dengan langkah strategis guna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi (Kurnia, 2006).

Pemerintah diberi kewenangan untuk menggali sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerintah dan pembiayaan pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber dana potensial bagi daerah, agar daerah dapat melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan deferensi bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian kewenangan kepada daerah itu sendiri sebagai imbas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25/ 1999 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menarik pungutan dan pajak, serta pemerintah pusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Realitas hubungan fiskal antara pusat-daerah ditandai dengan tingginya kontrol pusat terhadap proses pembangunan daerah. Hal ini dapat terlihat melalui tinggi atau rendahnya proporsi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap total pendapatan daerah dibanding besarnya subsidi (grants) yang diberikan oleh pusat. Indikator desentralisasi fiskal adalah rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah. PAD hanya membiayai pengeluaran rutin daerah sebesar kurang dari 30%, bahkan untuk Dati II lebih buruk lagi karena kurang dari 22% pengeluaran rutinnya dibiayai oleh PAD (Iskandar, 1993). Sumber pendapatan daerah diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan di Indonesia menciptakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah, salah

satunya adalah Jawa tengah yakni Eks-Karesidenan Surakarta, merupakan wilayah yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Di Kota Surakarta, secara agregat realisasi pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 98,65%. Terdapat perbedaan

anggaran dan realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya. Pada tahun 2012 sebesar 1.239,45 milyar rupiah, naik menjadi 1.385,11 milyar rupiah di tahun 2013. Dan pada tahun 2014 naik menjadi 1.525,58 milyar dan tahun 2015 naik sebesar 1.574,79 milyar. Demikian juga komponen DAU naik dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2012 sebesar 595,22 milyar rupiah dan pada tahun 2013 sebesar 659,65 milyar rupiah. DAU tahun 2014 sebesar 710,80 milyar. DAU tahun 2015 naik sebesar 713,3 milyar (BPS, 2016).

Pertumbuhan ekonomi wilayah eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2016 diperkirakan pada kisaran 5,2%-5,6%. Angka tersebut lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi nasional atau Indonesia, yang diperkirakan tumbuh sekitar 5,0%. Pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah tidak sama, menurut Hirschman (1958) jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas ke

daerah lain. Daerah disuatu negara dapat dibedakan menjadi daerah kaya dan daerah miskin. Perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi imbas yang baik (trickling down effects). Sedangkan jika perbedaan antara dua daerah tersebut semakin jauh maka terjadi proses pengkutubuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, desentralisasi daerah, efisiensi fiskal, dan peningkatan ekonomi Eks-Karesidenan Surakarta, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: **“Efisiensi Pengelolaan Pendapatan Daerah Karesidenan Surakarta Dalam Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat”**

1.2 Rumusan Masalah

Menganalisis tingkat efisiensi dari variabel input pendapatan daerah (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), penduduk tidak miskin, dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM).

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis efisiensi pengelolaan pendapatan daerah di Karesidenan Surakarta dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini akan bermanfaat memberikan informasi mengenai keberlangsungan suatu kebijakan publik sekaligus sumbangasih konseptual bagi perkembangan pada dunia ilmu ekonomi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengukur efisiensi sektor publik dalam hal ini pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain lain yang sah sebagai input terhadap pertumbuhan ekonomi yang sekaligus sebagai output, sehingga pemerintah dapat lebih efisien dan efektif dalam menentukan kebijakan.

b. Bagi Penulis

Sebagai sarana menambah pengetahuan dan wawasan dalam menerapkan teori-teori, konseptual yang ada untuk kemudian diimplementasikan di dunia nyata.

c. Bagi Pembaca

Memberikan tambahan pengetahuan dan informasi bagi pembaca, khususnya dalam determinasi efisiensi.

II. LANDASAN TEORI

2.2.1 Konsep Efisiensi

Efisiensi adalah proses ketepatan dalam menjalankan sesuatu atau kemampuan menjalankan tugas dengan baik

artinya tidak membuang waktu, tenaga, biaya, kedayagunaan dan ketepatan yang berlebihan. Menurut Mardiasmo (2009) efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan melalui perbandingan antara output dengan input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Efisiensi menggambarkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan (Saputra, 2011). Farrell (1957) membagi makna efisiensi menjadi dua komponen, yaitu: efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. Efisiensi teknis didefinisikan sebagai kapasitas dan kesediaan unit ekonomi untuk menghasilkan output semaksimal mungkin dari serangkaian input dan teknologi yang telah ditentukan. Saputra (2011) mendefinisikan efisiensi teknis sebagai kapasitas dan kesediaan unit ekonomi untuk menghasilkan output maksimum yang mungkin dari

2.2.2 Efisiensi Sektor Publik

Dalam penyediaan sektor publik perlu adanya efisiensi.

Efisiensi sektor publik adalah bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menggunakan keuangan daerah secara akurat dan optimal untuk menghasilkan sejumlah output atau layanan publik. Disediaknya sektor publik yaitu dengan tujuan untuk menghasilkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Kinerja sektor publik sendiri dilihat dengan tolak ukur berapa banyak pelayanan yang diberikan dan disediakan untuk masyarakat serta bagaimana kualitas dari pelayanan yang disediakan.

Menurut Kuhry and van der Torre (2002) dalam Ismail, Adham (2004), sektor publik secara legal definition meliputi organisasi pemerintah dan organisasi yang tunduk pada hukum publik. Dalam pengertian ini sektor publik termasuk organisasi yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai dari anggaran negara. Dalam penyempurnaan pengukuran efisiensi sektor publik yang lebih akurat, menurut Thompson Assifie (2004) dalam Ismail, Idham (2009) menyatakan bahwa dalam penetapan kriteria efisiensi kepada sektor publik tergantung kepada dua hal yaitu : Pertama, tingkat kejelasan (clarity) dan keterukuran (measurability) dari sasaran-sasaran yang ingin dicapai; dan Kedua, sejauh mana hubungan sebab akibat dalam proses organisasional dapat diketahui.

2.2.3 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Dari definisi tersebut jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai pengertian :

1. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus
2. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang
4. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari 2 aspek yaitu : aspek perbaikan dibidang organisasi (institusi) dan perbaikan dibidang regulasi (baik legal formal maupun informal) (Arsyad, Lincoln 1999).

Para ekonom mengartikan istilah pembangunan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertumbuhan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk atau perkembangan GDP/GNP yang terjadi dalam suatu negara dibarengi oleh perombakan dan modernisasi

struktur ekonominya (transformasi struktural). Menurut Rostow dalam Arsyad (2004), proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisonal (the traditional society), prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take off), tinggal landas (the take-off), menuju kedewasaan (the drive to maturity), dan masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumption).

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berarti sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan orientasi pada bidang ekonomi, politik, dan sosial yang berorientasi pada suatu daerah. Dalam pencapaian sasaran pembangunan ekonomi yang diinginkan maka pembangunan harus terfokus pada tiga hal pokok, antara lain yaitu meningkatkan ketersediaan dan pengoptimalan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan standar hidup masyarakat dan juga meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial. (Todaro, 2004)

2.2.3.1 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan

sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan perusahaan baru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori teori yang membahas tentang faktor faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu.

Adisasmita (2009) mengatakan bahwa pembangunan wilayah merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam. Tenaga kerja dan SDM. Investasi modal. Prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri. Teknologi. Situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah. Kewirausahaan kelembagaan dan lingkungan pembangunan secara luas.

2.2.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto

2.2.4.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad Lincoln 1999). Pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi (Sadono 2012).

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan Jhon Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu, jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam. Dan tingkat teknologi yang digunakan (Sadono, 1958).

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan PDRB, tetapi juga diukur dari immaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan, dengan rasa aman dan tenteram yang dirasakan masyarakat luas (Arsyad, 1999)

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dalam perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti

pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa, dan pertambahan produksi barang modal. Dalam pertumbuhan ekonomi ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai. Pertumbuhan ekonomi memiliki tingkat pendapatan perkapita yang fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan melalui 2 aspek utama yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output total mempunyai 3 unsur pokok sistem produksi meliputi, sumber daya alam yang tersedia, sumber daya insani, dan stok barang modal yang ada. Pertumbuhan ekonomi juga dapat menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan pendapatan lebih dari masyarakat pada periode tertentu. Dan juga indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) yang menggambarkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam

perekonomian suatu negara (Susanti, 2013).

2.2.4.2 Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi suatu negara di ukur oleh dua indikator utama yaitu PDB untuk ruang lingkup nasional dan PDRB untuk ruang lingkup regional. Istilah PDRB merupakan gabungan dari empat kata. Pertama adalah produk yang berarti seluruh nilai produksi baik barang maupun jasa. Kedua adalah domestik yang berarti perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh faktor-faktor produksi yang berada dalam wilayah domestik tanpa melihat apakah faktor produksi tersebut dikuasai oleh penduduk atau bukan. Ketiga adalah regional, artinya perhitungan nilai produksi yang dihasilkan hanya oleh penduduk tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan berada dalam wilayah domestik atau bukan. Terakhir adalah bruto yang bermakna perhitungan nilai produksi kotor karena masih mengandung biaya penyusutan.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Saat ini umumnya PDRB baru dihitung

berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu. Menurut Oktaviana Dewi (2012) PDRB merupakan alat ukur pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau region pada suatu jangka waktu tertentu. Dari sini dapat dilihat bahwa hubungan elastisitas antara pajak daerah yang diperoleh, dan pertumbuhan ekonomi yang dinilai dari pertumbuhan PDRB per kapita menggambarkan pertumbuhan yang otomatis dari potensi pajak. Dengan kata lain dalam konteks pajak daerah, semakin tinggi PDRB secara otomatis semakin tinggi pula pajak yang diterima daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik regional Bruto (PDRB), diantaranya adalah :

1. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah. Peningkatan PDRB mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor

produksi yang digunakan alam aktivitas produksi tersebut

2. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada suatu periode tertentu.
3. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah (perekonomian domestic). Hal ini memungkinkan untuk mengukur sejauhmana kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestic.

2.2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah tersebut. Menurut undang-undang no.28 tahun 2009, Pendapatan asli daerah adalah sumber keuangan daerah yang didapatkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan milik daerah (Mardiasmo 2002:132). Pendapatan asli daerah yang tinggi belum tentu menjadi jaminan tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah tersebut. Namun, tingginya

PAD dapat menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam pengembangan wilayah daerah tersebut dengan menggunakan PAD sebagai sumberdaya.

Undang undang No. 32 tahun 1956 menetapkan sumber sumber keuangan daerah sebagai berikut (Kristiadi 1991):

1. pendapatan asli daerah (PAD):

Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil perusahaan daerah. Adapun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah menjadi pajak daerah meliputi pajak verponding, pajak verponding indonesia, pajak rumah tangga, pajak kendaraan bermotor, pajak jalan, pajak potong hewan, pajak kopra dan pajak pembangunan.

2. sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu, bea masuk, bea keluar dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negara tertentu adalah pajak peralihan, pajak upah, pajak matri, pajak kekayaan dan pajak perseroan.

3. ganjaran, subsidi dan bantuan, diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu.

2.2.5.1 Pajak Daerah

Pemerintah daerah memerlukan sumber fiskal dalam memenuhi tanggung jawab pertumbuhan daerahnya. UU No. 25/1999 menyatakan bahwa untuk tujuan tersebut pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk

menarik pungutan dan pajak, dan pemerintah pusat harus mentransfer sebagian pendapatan dan atau membagi sebagian pendapatan pajaknya dengan pemerintah daerah. Perpajakan daerah adalah kewajiban penduduk untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukuman. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan nasional tetapi tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah (Adisasmita, 2011).

Jenis pajak daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten dan kota terbatas pada tujuh jenis, seperti pajak hotel dan restoran, pajak iklan, pajak atas bahan bangunan, pajak penggunaan air, pajak hiburan, pajak IMB, dan retribusi lain-lain. Terdapat perubahan antara UU No. 18 Tahun 1997 dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah (Simanjuntak, 2003) :

1. Di Provinsi terdapat perluasan PKB dan BBNKB menjadi PKB dan BBNKB yang memasukkan kendaraan diatas air
2. Di Provinsi penambahan jenis pajak dengan pajak engambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yang sebelumnya

- merupakan pajak kabupaten / kota.
3. Dibedakannya pajak hotel dengan pajak restoran untuk kabupaten/kota yang sebelumnya dijadikan satu.
 4. Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C untuk kabupaten/kota yang diubah menjadi pajak pengambilan bahan galian golongan C
 5. Penambahan pajak parkir sebagai sumber penerimaan pajak baru
 6. Kabupaten/kota diberikan keleluasaan dalam penambahan jenis pajak baru dengan kriteria yang harus diikuti.

2.2.5.2 Retribusi Daerah

Menurut Adisasmita (2011) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan tersebut bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, maka tidak akan dikenakan iuran tersebut. Menurut Ahmad Yani (2002) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau instansi terkait

Terdapat sifat atau ciri-ciri retribusi menurut Haritz (1995) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan bersifat ekonomis
- b. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
- c. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material
- d. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya budget airnya (penerimaannya) tidak menonjol
- e. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat

Retribusi terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum
2. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha
3. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu

2.2.6 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut UU No. 25/1999 pasal 6, Dana perimbangan terdiri dari :

1. Bagian Daerah (Dana Bagi Hasil) dari PBB, BPHTB, PPh orang pribadi dan SDA (Sumber Daya Alam)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

2.2.6.1 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang dibagi berdasarkan presentase tertentu bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi kurangnya sumber pajak. Pendapatan pemerintah pusat dari eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak dan gas, pertambangan dan kehutanan dibagi dalam proporsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penerimaan negara yang dibagihasilkan terdiri atas :

1. Penerimaan pajak
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguna (BPHTB)
 - c. PPh Orang Pribadi
2. Penerimaan bukan pajak (SDA)
 - a. Sektor kehutanan
 - b. Sektor pertambangan umum
 - c. Sektor minyak bumi dan gas alam
 - d. Sektor perikanan

2.2.6.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum atau yang biasa disebut DAU adalah transfer dana antar pemerintah dari

pusat ke kabupaten/kota. DAU merupakan block grant yang diberikan ke[ada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fisiknya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebihbanyak daripada daerah kaya.

Tujuan adanya DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. UU No. 25/1999 pasal 7 menggariskan bahwa pemerintah pusat berkewajiban menyalurkan paling sedikit 25% dari Penerimaan dalam negerinya dalam bentuk DAU

Secara definisi, Dana alokasi umum dapat diartikan sebagai berikut (Sidik, 2003) :

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal atau celah fiskal (fiscal gap), yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal
2. Instrumen untuk mengatasi horizontal imbalance, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah dimana penggunaannya

ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.

3. Equalization grant, yaitu berfungsi untuk menetralkan ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, bagi hasil pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah.

Panitia anggaran DPR-RI dengan pemerintah tanggal 10 juli 2002, menetapkan penyempurnaan formula dan perhitungan DAU dilakukan dengan :

1. Meningkatkan akurasi data dasar yang digunakan
2. Mengurangi porsi DAU yang diperhitungkan dalam AM dan memperbesar porsi DAU yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah (perhitungan DAU dengan formula dalam PP 84/2001)
3. Diupayakan untuk tetap mempertahankan bahwa tidak ada daerah yang menerima DAU TA 2003 kurang dari atau minimal sama dengan DAU plus dana penyeimbang TA 2002. Oleh karena itu, diberikan tambahan dana melalui dana penyeimbang TA 2003.

Formula DAU tahun anggaran 2003 berdasarkan PP Nomor 84 Tahun 2001 adalah sebagai berikut (Sidik, 2003) :

$$\begin{aligned} \mathbf{DAU_i} &= \mathbf{AM + KF} \\ \mathbf{AM} &= \mathbf{LS + \alpha \text{ Gaji}} \end{aligned}$$

$$\mathbf{KF_i} = \mathbf{Bdi \times DAU_n}$$

$$\mathbf{BDi} = \frac{(\mathbf{KbF - KpF})_i}{(\mathbf{KbF - KpF})_n}$$

Keterangan :

DAU_i : Dana alokasi umum provinsi atau kabupaten/kota

DAU_n : Dana alokasi umum seluruh provinsi atau kabupaten/kota

AM : Alokasi minimum

KF : Kesenjangan fiskal

BD : Bobot daerah

LS : Lumpsum

αGaji : Proporsional berdasarkan kebutuhan gaji

KbF : Kebutuhan fiskal dari provinsi atau kabupaten/kota

KpF : Kapasitas fiskal dari provinsi atau kabupaten/kota

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU No. 25/1999, plafon DAU ditetapkan sekurang kurangnya 25% dari PDN dalam APBN. Dalam praktek dirinci menjadi :

1. Dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota, dengan rasio 10% provinsi dan 90% kabupaten/kota. (pasal 7 ayat (2) UU No. 25/1999)

2. Dalam implementasinya, plafon DAU untuk provinsi (10%) lebih kecil dari kebutuhan DAUnya. Kenyataannya, plafon DAU TA 2002 provinsi (10%) sebesar Rp. 6.911,41 miliar ternyata lebih kecil dibandingkan DAU provinsi TA 2001 ditambah daa

kontinjensi yang mencapai Rp. 7.465,46 miliar.

2.2.6.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan suatu dana yang ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih dan untuk tujuan khusus yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya yang sekaligus merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik secara ekonomis untuk jangka panjang. Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi :

1. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi
3. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik yang terletak di daerah pesisir/ kepulauan dan tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai
4. Kebutuhan sarana dan prasarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan

Persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut :

1. Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran kegiatan melalui dana PAD, bagi hasil pajak dan SDA, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah
 2. Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari dana reboisasi)
 3. Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis/instansi terkait
- Berdasarkan PP 104/2000 DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan

2.2.7 Lain - lain Pendapatan yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain Pendapatan yang Sah, antara lain adalah hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Adisasmita, 2014).

2.2.8 Kemiskinan

Kemiskinan menurut Bappenas (2004) adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pemenuhan air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Dalam pandangan Friedman, kemiskinan juga berarti ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial ini meliputi :

1. Modal produktif seperti tanah, alat produksi, perumahan, kesehatan
2. Sumber keuangan
3. Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama seperti koperasi, partai politik, organisasi sosial
4. Jaringan sosial
5. Pengetahuan dan ketrampilan
6. Informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman dalam Suharto, dkk., 2004).

Kemiskinan seringkali ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran dan keterbelakangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan

terbatas aksesnya terhadap kegiatan ekonomi sehingga akan tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi. Ukuran kemiskinan dilihat dari tingkat pendapatan dapat dikelompokkan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Kartasamita, Ginandjar: 1996: 234-235). Seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolut atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut, dengan mengacu pada definisi kemiskinan oleh Sayogyo (2000). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg beras per kapita per bulan untuk daerah pedesaan, dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung setara 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian).

2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas

hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (BPS, 2016).

Terdapat beberapa komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), diantaranya adalah :

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir - Life Expectancy (e_0)
Angka Harapan Hidup (AHH) saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
2. Rata-rata Lama Sekolah - Mean Years of Schooling (MYS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

3. Harapan Lama Sekolah - Expected Years of Schooling (EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang

bersekolah di pesantren. Sumber data pesantren yaitu dari Direktorat Pendidikan Islam.

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan - Purchasing power parity (PPP)

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun.

- Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya.
- Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan } IPM_t = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100 \%$$

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang dipublikasi oleh instansi atau organisasi yang bukan pengelolanya, dan laporan tahunan yang ada di daerah setempat. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa instansi atau sumber-sumber lain. Adapun data yang digunakan antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, lain-lain Pendapatan yang Sah, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Kemiskinan serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), dalam metode ini memerlukan data variabel yang terdiri dari variabel input dan variabel output, suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Variabel input dan output yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

A. Variabel Input

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Merupakan pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Pendapatan ini antara lain yaitu dari hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B. Variabel Output

1. Pertumbuhan Ekonomi

Merupakan peningkatan dalam sistem perekonomian atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan nilai tambah dari produksi barang dan jasa masyarakat daerah (PDRB) yang bersangkutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kemiskinan

Kondisi dimana tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah sehingga mengancam mereka dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dalam konsumsi, mendapatkan layanan dasar kesehatan, pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Merupakan indeks pembangunan manusia yang mengukur capaian dari pembangunan antara lain yaitu pencapaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan, angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah yang merupakan acuan untuk mengukur kinerja

pembangunan bidang pendidikan, serta kemampuan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita. Ukuran dari IPM merupakan salah satu variabel dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian wilayah.

3.3 Metode Analisis dan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Data Envelopment Analysis (DEA). DEA adalah suatu metodologi yang digunakan untuk mengetahui efisiensi dari suatu unit pengambilan keputusan atau unit kerja yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah input untuk memperoleh suatu output yang ditargetkan. DEA menghitung ukuran efisiensi secara skalar dan menentukan level input dan output yang efisien untuk unit yang dievaluasi. Metode DEA diciptakan sebagai alat evaluasi kinerja suatu aktivitas di sebuah unit entitas (organisasi) yang selanjutnya disebut Decision Making Unit (DMU). Secara sederhana, pengukuran ini dinyatakan dengan rasio output/input, yang merupakan suatu pengukuran efisiensi atau produktivitas.

Dalam DEA, efisiensi relatif unit kegiatan ekonomi (UKE) didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (total weighted output / total weighted input). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat, diantaranya adalah :

1. tidak bernilai negatif
2. bersifat universal ;

artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (total weighted output / total weighted input) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (total weighted output / total weighted input ≤ 1).

3.4 Nilai Manajerial DEA

Teori DEA memiliki beberapa konsep nilai yang digunakan sebagai dasar proses manajerial yaitu (PAU UGM, 2000) :

- a. Nilai rasio efisiensi bersifat relatif, berarti DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE yang relatif terhadap sampel unit lain. Hal ini dapat digunakan untuk melihat unit ekonomi yang membutuhkan perbaikan manajerial atau yang membutuhkan perhatian dan merencanakan

tindakan perbaikan UKE yang tidak/kurang efisien

- b. DEA menunjukkan unit ekonomi yang memiliki efisiensi sempurna dengan nilai 100% dan yang kurang efisien dengan nilai <100%. jika suatu UKE kurang efisien (efisien < 100%) maka DEA dapat menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (efficient reference set, efisiensi = 100%) dan seperangkat angka pengganda (multipliers) yang dapat digunakan oleh Instansi untuk menyusun strategi perbaikan atau angka multiplier yang digunakan sebagai dasar perbaikan manajerial.
- c. DEA menyajikan matriks efisiensi silang yang dapat menunjukkan unit kegiatan ekonomi (UKE) efisiensi dengan input berbeda dan menghasilkan output yang berbeda dengan unit kegiatan ekonomi (UKE) yang lain

3.5 Formulasi DEA

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode DEA. Misalkan, kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misalkan n. Setiap UKE menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis output.

Misal $X_{ij} > 0$ merupakan jumlah input i yang digunakan oleh UKE_j dan misalkan $Y_{rj} > 0$ merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE_r. Variabel keputusan (decision variable) dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh UKE_k. V_{ik} adalah bobot yang diberikan pada input i oleh unit kegiatan k dan U_{rk} adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k. Sehingga V_{ik} dan U_{rk} merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui interaksi program linear fraksional (*fractional linear programs*), suatu formulasi program linear untuk setiap UKE dalam sampel. Fungsi tujuan (*objective function*) dari setiap program linear fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total (total weighted output) dari UKE k dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan tersebut adalah sebagai berikut (PAU UGM, 2000) :

$$\text{Memaksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik}}$$

Kriteria universalitas mensyaratkan UKE k untuk memiliki bobot dengan batasan atau kendala bahwa tidak ada satu UKE lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar 1 atau 100%, jika UKE lain tersebut menggunakan bobot

yang dipilih oleh UKE k sehingga formulasi selanjutnya adalah:

$$\frac{\sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ij}} \leq 1; j = 1, \dots, n$$

$$\leq 0; j = 1, \dots, n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif:

Program linear fraksional kemudian ditransformasikan ke dalam program linear biasa (*ordinary linear program*), dan metode simpleks dapat digunakan untuk menyelesaikannya.

Transformasi program linear, yang disebut dengan DEA (*Data Envelopment Analysis*), adalah sebagai berikut:

DEA memaksimumkan $Z_k = \sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rk}$

Dengan batasan atau kendala :

$$[P_{kj}] \sum_{r=1}^s U_{rk} \cdot Y_{rj} - \sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ij}$$

$$[q_k] \sum_{i=1}^m V_{ik} \cdot X_{ik} = 1$$

$$U_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0; i = 1, \dots, m$$

Rumus diatas mengasumsikan kedua teknologi Constan return to scale dimana :

Y_{rk} = Jumlah output r yang dihasilkan oleh sektor k

X_{ik} = Jumlah input i yang diperlukan oleh sektor k

Y_{rj} = Jumlah output r yang dihasilkan oleh sektor j

X_{ij} = Jumlah input i yang diperlukan oleh sektor j

s = Jumlah sektor yang dianalisis

m = Jumlah input yang digunakan

V_{ik} = Bobot tertimbang dari output r yang dihasilkan tiap sektor k

Z_k = Nilai yang dipotimalkan sebagai indikator efisien relatif dari sektor k

3.6 Keunggulan dan Kelemahan DEA

Dari uraian mengenai konsep Data Envelopment Analysis di atas, dan menurut Dr. Tim dalam Erwinta dan Nugroho (2005), maka terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan metode DEA, diantaranya adalah :

A. Keunggulan

1. DEA dapat menangani pengukuran efisiensi secara relatif beberapa UKE (Unit Kegiatan Ekonomi) sejenis dengan menggunakan banyak input dan output.
2. Mampu mengidentifikasi sumber-sumber inefisiensi secara spesifik sehingga diperoleh informasi secara rinci pada masing-masing UKE

3. DEA dapat memberi arah pada UKE yang tidak efisien untuk meningkatkan efisiensinya melalui kegiatan benchmarking terhadap UKE yang efisien (Efficient Reference Set).
 4. Dengan metode DEA, tidak perlu mencari asumsi bentuk fungsi hubungan antara variabel input dan output dari UKE sejenis yang akan diukur efisiensinya
 5. Faktor input dan output dapat memiliki satuan pengukuran yang berbeda tanpa perlu melakukan perubahan satuan dari kedua variabel tersebut.
- B. Kelemahan
1. Karena DEA merupakan sebuah *extremepoint technique*, kesalahan-kesalahan pengukuran dapat mengakibatkan masalah yang signifikan.
 2. DEA hanyalah menunjukkan perbandingan baik buruk apa yang telah dilakukan sebuah UKE dibandingkan dengan sekumpulan UKE sejenis (relatif).
 3. Karena DEA adalah teknik non parametrik, uji hipotesis secara statistik sulit dilakukan

IV. ANALISA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskripsi

Untuk memberikan ilustrasi besaran variabel yang diteliti, dilakukan perhitungan secara deskriptif, yang mencakup perhitungan nilai rata-rata dan nilai tertinggi ataupun terendah. Dalam menganalisa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari pendapatan regional. Perekonomian suatu daerah dapat diukur dari beberapa indikator yaitu, pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kemudian kesejahteraan masyarakat yang dapat ditunjukkan oleh jumlah penduduk suatu daerah yang tergolong tidak miskin, serta tingkat pembangunan manusia berdasarkan tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mengukur perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup di suatu daerah.

4.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) mulai dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2017 di Karesidenan Surakarta

Berdasarkan data yang diperoleh yaitu PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan. Diketahui bahwa PDRB di Karesidenan Surakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya pada tahun 2015-2017. Kota Surakarta merupakan daerah dengan PDRB tertinggi di daerah Karesidenan Surakarta. Pada tahun 2015 PDRB Kota Surakarta mencapai Rp.28.453.494.000.000, pada tahun 2016 mencapai Rp.29.966.373.000.000, kemudian pada tahun 2017 mencapai Rp. 31.562.980.460.000. PDRB tinggi dikarenakan tingginya pendapatan pada sektor konstruksi, kemudian diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 disektor konstruksi, Kota Surakarta berturut-turut menyumbang pendapatan sebesar Rp.7.390.395.310.000, Rp. 7.865.547.960.000, dan Rp.8.255.938.750.000. Kemudian pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang pendapatan terbesar kedua yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.6.730.422.130.000, pada tahun 2016 sebesar Rp.7.036.700.290.000, dan pada tahun 2017 sebesar Rp.7.415.193.590.000. Daerah dengan PDRB terendah adalah Kabupaten Wonogiri, yaitu sebesar

Rp. 16.977.199.000.000 pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2016 sebesar 17.865.345.000 dan diikuti dengan tahun 2017 sebesar Rp. 18.788.397.760.

Rata-rata PDRB di Karesidenan Surakarta pada tahun 2015 adalah Rp. 21.492.755.591 kemudian pada tahun 2016 adalah Rp. 22.653.616.209 dan tahun 2017 sebesar Rp. 23.887.503.499. Dari rata-rata tersebut masih terdapat beberapa kabupaten yang PDRBnya dibawah rata-rata, meliputi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Namun pada tahun 2017 PDRB Kabupaten Sragen melebihi dari PDRB rata-rata yaitu sebesar Rp. 23.933.252.170

4.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu problematika dalam sistem perekonomian yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi: terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pemenuhan air bersih, pertanian, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak

untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Tingkat kemiskinan merupakan acuan dari tingkat pembangunan ekonomi. Semakin rendah tingkat kemiskinan maka semakin baik tingkat pembangunan ekonomi.

Setiap tahun Kabupaten atau Kota di Karesidenan Surakarta mengalami penurunan presentase penduduk miskin, terkecuali pada Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2015 presentase penduduk miskin di Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan yaitu dapat dilihat dari penurunan presentase penduduk tidak miskin sebesar 86,88 sedangkan pada tahun 2015 sebesar 87,02. Tingkat kemiskinan terendah terdapat pada Kabupaten Sukoharjo dilihat berdasarkan presentase penduduk tidak miskin yang terbanyak pada daerah tersebut yaitu sebesar 90,74% pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 sebesar 90,93% dan pada tahun 2017 sebesar 91,25%. Sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi terdapat pada Kabupaten Klaten. Berdasarkan presentase penduduk tidak miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2015 sebesar 85,11%, kemudian pada tahun 2016 sebesar 85,54% dan pada tahun 2017 sebesar 85,85%.

Telah dipaparkan juga rata-rata dari presentase penduduk tidak miskin. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masih banyak daerah di Karesidenan

Surakarta yang presentase penduduk tidak miskinnya dibawah rata-rata. Pada tahun 2015 terdapat tiga daerah dengan presentase penduduk tidak miskin dibawah rata-rata yaitu Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 terdapat empat Kabupaten yaitu, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen.

4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Salah satu indikator penting dalam pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari indeks ekonomi (pendapatan riil per kapita), indeks pendidikan (angka melek huruf dan lama sekolah), dan indeks kesehatan (umur harapan hidup waktu lahir). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 IPM di Karesidenan Surakarta mengalami kenaikan. Daerah tertinggi capaian IPM terdapat pada Kota Surakarta. Pada tahun 2015

IPM Kota Surakarta sebesar 80,14, kemudian pada tahun 2016 sebesar 80,76 dan pada tahun 2017 IPM mencapai 80,85. Sedangkan IPM terendah terdapat pada Kabupaten Wonogiri, yaitu pada tahun 2015 sebesar 67,76, kemudian pada tahun 2016 sebesar 68,23 dan pada tahun 2017 sebesar 68,66. Terdapat beberapa daerah yang mempunyai IPM dibawah rata-rata. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Kabupaten Boyolali, Wonogiri dan Sragen berturut-turut memiliki IPM dibawah rata-rata

4.1.4 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

4.1.4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam pengembangan dan pembangunan wilayah daerah

dengan menggunakan PAD sebagai sumberdaya.

Besar penerimaan PAD pada masing-masing daerah di Karesidenan Surakarta, terdapat penerimaan PAD tertinggi yaitu pada Kota Surakarta, pada tahun 2015 PAD sebesar Rp. 372.798.426.790, kemudian pada tahun 2016 Rp. 425.502.779.064 dan terus menerus meningkat hingga tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 527.538.846.220. Hal ini karena didukung dari hasil penerimaan pajak daerah yang merupakan sumber pendapatan terbesar pada daerah tersebut. Penerimaan pajak daerah Kota Surakarta pada tahun 2015,2016, dan 2017 berturut-turut adalah Rp.233.085.404.386, Rp.252.052.998.369, dan Rp.288.417.472.037. Adapun PAD yang terkecil terdapat pada Kabupaten Klaten, ditunjukkan pada tahun 2015 PAD Kabupaten Klaten sebesar Rp. 190.622.670.128 namun pada tahun selanjutnya yaitu 2016 dan 2017 Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dan tidak lagi menjadi Kabupaten dengan PAD terendah. Pada tahun 2016 dan 2017 Kabupaten Wonogiri menjadi Kabupaten dengan PAD terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 218.604.854.600 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 333.840.434.900

Terdapat beberapa daerah yang mempunyai PAD dibawah rata-rata. Pada tahun 2015 dan 2016 daerah dengan PAD dibawah rata-rata

adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Kemudian terdapat perubahan pada tahun 2017, dimana daerah dengan PAD dibawah rata-rata bertambah menjadi Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen

4.1.4.2 DanaPerimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Dana perimbangan merupakan kelompok sumber pembiayaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 dana perimbangan berasal dari bagi hasil pusat dan daerah yaitu PBB, BPHTB, sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

Dana Perimbangan di Karesidenan Surakarta menampilkan bahwa dana

perimbangan setiap tahunnya mengalami perubahan, dibuktikan pada tahun 2015 dana perimbangan terbesar didapatkan oleh Kabupaten Sragen yaitu sebesar Rp. 1.154.055.980.941. Adapun dana perimbangan terbesar dari sektor dana alokasi umum (DAU), yaitu dana yang dialokasikan pemerintah pusat pada setiap daerah otonom sebagai dana pembangunan daerah. Kabupaten Sragen memiliki DAU sebesar Rp.977.443.589.000. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 dana perimbangan terbesar adalah pada Kabupaten Klaten yaitu sebesar Rp. 1.573.615.108.481 dan Rp. 1.624.715.625.119. Pada Kabupaten Klaten pemasukan terbesar pada dana perimbangan adalah pada sektor DAU, yaitu berturut-turut sebesar Rp.1.204.344.586.098 dan Rp.1.271.590.067.902. Adapun dana perimbangan terkecil adalah pada Kota Surakarta. Pada tahun 2015 dana perimbangan yang didapat sebesar Rp. 755.728.419.465, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.103.859.741.264, selanjutnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.048.161.106.387. Berdasarkan data diatas dana perimbangan terkecil adalah pada Kota Surakarta, hal ini dikarenakan Kota Surakarta mempunyai PAD yang paling tinggi di Karesidenan Surakarta.

Perhitungan rata-rata dari dana perimbangan di Karesidenan

Surakarta yang berasal dari APBD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Terdapat beberapa daerah yang memiliki dana perimbangan dibawah rata-rata. Pada tahun 2015 daerah dengan dana perimbangan dibawah rata-rata adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 daerah dengan dana perimbangan dibawah rata-rata adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta

4.1.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain – lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lain-lain Pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lain-lain pendapatan yang sah di Karesidenan Surakarta mengalami fluktuasi yaitu terdapat perubahan kenaikan atau penurunan setiap tahunnya. Menurut dari perhitungan rata-rata pada tahun 2015 sebesar Rp 513.523.599.678, kemudian pada tahun 2016 Rp 329.520.371.143 dan tahun 2017

yaitu sebesar Rp 398.674.684.624. Adapun daerah yang menerima lain-lain pendapatan yang sah terkecil yaitu pada Kabupaten Boyolali tetapi hanya pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 219.583.123.000. Sedangkan ditahun 2016 dan 2017 penerimaan terkecil terjadi pada Kota Surakarta yaitu sebesar Rp. 173.641.327.667 dan Rp. 228.215.470.550. Kemudian penerimaan lain-lain pendapatan yang sah terbesar dari tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu Kabupaten Klaten. Pada tahun 2015 penerimaan lain-lain pendapatan yang sah pada Kabupaten Klaten adalah sebesar Rp. 707.207.496.446, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 460.792.113.543 dan pada tahun 2017 adalah Rp. 585.081.231.492. Pendapatan tersebut didukung oleh sektor bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

Pembangunan ekonomi regional memiliki tujuan dalam usaha mencapai keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan total perkapita dengan memperhatikan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental struktur ekonomi suatu daerah yang bertujuan untuk meraih keberhasilan pembangunan ekonomi, berbagai kebijakan yang dilakukan diantaranya dapat digolongkan sebagai kebijakan

fiskal daerah atau pengelolaan keuangan daerah dengan mengontrol pendapatan dan pengeluaran melalui APBD.

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengelola keuangannya. Melalui kebijakan ini pemerintah mengelola keuangan tersebut untuk mencapai keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Ada beberapa indikator yang diamati yaitu struktur penerimaan, pengeluaran dan dampak terhadap pembangunan ekonomi regional. Variabel yang dipilih berdasarkan besarnya peranan terhadap kapasitas keuangan daerah dan dampak terhadap perekonomian daerah, lalu kedekatan antara hubungan variabel. Artinya variabel input dianggap sangat erat hubungannya dengan pencapaian variabel output. Variabel output yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil berdasarkan perhitungan dari PDRB riil perkapita penduduk dikali dengan jumlah penduduk. PDRB menjelaskan kondisi dan dapat menjelaskan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah.
2. Presentase penduduk tidak miskin sebagai variabel yang mencerminkan keberhasilan

pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), variabel IPM mencerminkan tingkat keberhasilan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan ekonomi dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Adapun variabel input meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD, dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi

umum dan dana alokasi khusus.

3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang sah antara lain hibah, dana darurat, pinjaman daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran tingkat efisiensi berdasarkan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang menganalisis input dan output suatu daerah. Penelitian ini melakukan perhitungan tingkat efisiensi mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 pada masing-masing daerah kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta. Adapun hasil dari perhitungan dengan menggunakan metode DEA telah diperoleh tabel efisiensi untuk masing-masing kabupaten/kota di Karesidenan Surakarta.

Hasil olah data dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA), berdasarkan dari data tersebut pada tahun 2015 di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa ketiga Kabupaten tersebut tidak efisien relatif 100%. Adapun masing-masing tingkat efisiensi yang ditunjukkan yaitu pada Kabupaten Sukoharjo tingkat efisiensinya sebesar 97.14%, Kabupaten

Wonogiri 98,93%, kemudian Kabupaten Sragen sebesar 84,91%. Pada tahun 2016 terdapat penurunan daerah yang tidak efisien. Terdapat dua daerah yang tidak efisien relatif 100% yaitu, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Kedua daerah tersebut menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 99,13% dan 93,24%. Pada tahun 2017 terdapat dua kabupaten yang tidak efisien relatif 100%, daerah tersebut adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Kedua daerah tersebut menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 91,91% dan 98,76%. Sementara itu, terdapat beberapa daerah yang memiliki efisiensi relatif 100%. Pada tahun 2015 daerah dengan tingkat efisiensi relatif 100% adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Kemudian pada tahun 2016 adalah kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Pada tahun 2017 daerah dengan tingkat efisiensi relatif 100% adalah pada Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta.

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah yaitu meliputi PAD, Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah yang telah digunakan untuk mencapai pembangunan ekonomi masing-

masing daerah dalam usaha meningkatkan PDRB, IPM, dan usaha dalam mengurangi kemiskinan sebagai output dari pembangunan ekonomi. Telah ditunjukkan pada hasil tabel 4.7 bahwa setiap tahun di Karesidenan Surakarta mengalami perubahan pada daerah yang memiliki tingkat efisiensi relatif 100% atau inefisiensi. Pada tahun 2015 ketiga daerah yaitu Kabupaten Sukoharjo, Wonogiri, dan Sragen menunjukkan hasil yang belum efisien 100%. Sejalan dengan hal tersebut pada tahun 2016 dan 2017 berdasarkan hasil olah data mengalami pengurangan menjadi dua daerah yang menunjukkan tingkat inefisiensi atau kurang dari 100% yaitu pada tahun 2016 adalah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen, Kemudian pada tahun 2017 adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri. Secara keseluruhan tingkat efisiensi pengelolaan dana sektor public Karesidenan Surakarta dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi, hal ini dilihat dari rata-rata hasil efisiensi di Karesidenan Surakarta. Dari hasil rata-rata dibuktikan pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu dari 97,28 menjadi 98,91, kemudian pada tahun 2017 terdapat penurunan yaitu menjadi 98,67. Penurunan dan kenaikan tingkat efisiensi memiliki selisih yang sedikit, hal ini dikarenakan sedikitnya selisih tingkat efisiensi setiap daerah.

telah menunjukkan seberapa besar dana dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah yang sebaiknya digunakan untuk mencapai efisiensi 100%. Dari hasil yang telah diperoleh menunjukkan seberapa besar pemborosan dana yang telah digunakan untuk pembangunan dalam usaha peningkatan PDRB, IPM dan mengurangi kemiskinan pada masing-masing daerah yang telah terindikasi tidak efisien relatif 100% dalam pengelolaan keuangan pada sektor tersebut. Pemborosan yang terjadi berdasarkan data yang sudah diolah pada tahun 2015 Kabupaten Sragen menjadi daerah yang paling rendah tingkat efisiensinya yaitu sebesar 84,91%, maka berdasarkan analisis DEA Kabupaten Sragen untuk mencapai tingkat efisiensi 100% hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 227.312.843.704, dari dana perimbangan sebesar Rp. 979.903.488.730, kemudian dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 476.094.803.860. Terdapat solusi melalui hasil analisis DEA, bahwa Kabupaten Sragen harus mengurangi penggunaan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp 40.398.976.740, kemudian harus mengurangi dari dana perimbangan sebesar Rp. 174.152.492.170, dan dari dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 126.194.819.610. Adapun Kabupaten lainnya yang

memiliki efisiensi kurang dari relatif 100% pada tahun 2015, yaitu Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. Kabupaten Sukoharjo dalam mencapai tingkat efisiensi relatif 100% hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 304.977.500.760, dari dana perimbangan sebesar Rp. 917.650.672.510, kemudian dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 479.115.230.690. Terdapat solusi melalui hasil olah data analisis DEA, bahwa Kabupaten Sukoharjo harus mengurangi penggunaan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp 8.969.991.240, kemudian harus mengurangi dana perimbangan sebesar Rp. 26.989.920.490, dan dari dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 46.403.049.310. Kabupaten Wonogiri dalam mencapai tingkat efisiensi relatif 100% hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 208.946.549.200, dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.133.825.901.000, kemudian dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 577.801.007.470. Terdapat solusi melalui hasil olah data analisis DEA, bahwa Kabupaten Wonogiri harus mengurangi penggunaan dana yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 2.262.052.000, kemudian harus mengurangi dana perimbangan sebesar Rp. 12.274.781.100, dan dari dana lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 28.594.248.000 hal ini dilakukan untuk meningkatkan

PDRB, IPM, dan mengurangi jumlah kemiskinan. Selanjutnya pada tahun 2016 terjadi perubahan daerah dengan efisiensi kurang dari 100%, daerah tersebut adalah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali, yang masing-masing memiliki tingkat efisiensi mendekati 100% yaitu 99,13% dan 93,24%. Agar mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Sragen hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 277.098.020.440, kemudian dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.345.114.732.600, dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 278.587.221.950. Untuk mencapai tujuan pembangunan maka Kabupaten Sragen dianjurkan untuk mengurangi dana PAD sebesar Rp. 20.078.312.140, mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp. 97.465.992.100 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 74.414.863.710. Kemudian pada Kabupaten Boyolali untuk mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 289.765.400.790, kemudian dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.346.618.912.500, dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 300.551.965.430, maka Kabupaten Boyolali dianjurkan untuk mengurangi dana PAD sebesar Rp. 2.544.631.440, mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp. 11.825.596.800 dan

dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 42.188.605.190.

Pada tahun 2017 juga terjadi perubahan daerah dengan efisiensi kurang dari 100%, daerah tersebut adalah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri, yang masing-masing memiliki tingkat efisiensi mendekati 100% yaitu 91,91% dan 98,76%. Agar mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Klaten hanya memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 341.661.196.500, kemudian dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.493.340.727.100, dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 368.226.897.940. Untuk mencapai tujuan pembangunan maka Kabupaten Klaten dianjurkan untuk mengurangi dana PAD sebesar Rp. 30.057.242.810, mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp. 131.374.898.000 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 216.854.333.550. Kemudian pada Kabupaten Wonogiri untuk mencapai efisien dalam pengelolaan keuangan memerlukan dana dari PAD sebesar Rp. 329.699.214.530, kemudian dari dana perimbangan sebesar Rp. 1.501.249.032.500, dan dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 402.502.616.760, maka Kabupaten Boyolali dianjurkan untuk mengurangi dana PAD sebesar

Rp. 4.141.220.370, mengurangi penggunaan dana perimbangan sebesar Rp. 18.856.590.400 dan dapat mengurangi penggunaan dana yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 61.529.982.130. Jika input dapat dikelola yaitu mengelola pendapatan dan pengalokasian dana dengan tepat serta dapat mengurangi pemborosan sesuai tabel (4.8) maka Kabupaten/ Kota di karesidenan Surakarta dapat efisien 100%. Dalam efisiensi radial atau keseluruhan tidak hanya melalui input saja, tetapi output juga berpengaruh terhadap efisiensi radial. Adapun penggunaan output yang efisien dan peningkatan agar output menjadi relatif 100%.

Besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan jumlah PDRB, presentase jumlah penduduk tidak miskin, dan tingkat indeks pembangunan manusia (IPM) yang seharusnya dicapai agar efisiensi relatif 100%. Dari hasil yang telah diperoleh menunjukkan seberapa besar peningkatan yang harus dicapai terhadap PDRB, jumlah penduduk tidak miskin, dan IPM agar efisien relatif 100%. Berdasarkan tabel (4.8) yaitu dana input yang telah digunakan untuk pembangunan dalam usaha menghasilkan output berupa PDRB, presentase jumlah penduduk tidak miskin, dan IPM yang dalam hal ini telah terindikasi tidak efisien relatif 100%, makadariitu sangat diperlukan

peningkatan terhadap output yang dihasilkan.

Pada tahun 2015, terdapat tiga Kabupaten yang terindikasi tidak efisien 100%, diantaranya adalah Kabupaten Sragen, Sukoharjo, dan Wonogiri. Berdasarkan analisis DEA, Kabupaten Sragen memiliki dua output yang sudah relatif 100% yaitu PDRB dan presentase penduduk tidak miskin (PPTM). Selanjutnya output yang tidak efisien adalah IPM. Melalui hasil olah data analisis DEA, menunjukkan pencapaian target agar efisiensi relatif 100% yaitu sebesar 72,7%. Untuk mencapai target tersebut Kabupaten Sragen perlu meningkatkan IPM sebesar 1,6%. Kabupaten Sukoharjo memiliki output yang efisien relatif 100%, yaitu presentase penduduk tidak miskin (PPTM) serta output yang tidak efisien yaitu PDRB dan IPM. Kabupaten Sukoharjo mencapai output yang efisien jika memiliki PDRB sebesar Rp. 25.602.424.841 dan IPM sebesar 79,3%. Dalam mencapai target tersebut Kabupaten Sukoharjo perlu meningkatkan PDRB sebesar Rp. 3.990.346.841 dan meningkatkan IPM sebesar 4,8%. Dalam peningkatan PDRB, Kabupaten Sukoharjo dapat meningkatkan pada sektor Industri pengolahan, karena merupakan sektor dengan pemasukan PDRB tertinggi yaitu pada tahun 2015 mencapai Rp. 8.285.662.000. Jika sektor industri pengolahan

meningkat secara signifikan setiap tahunnya maka output PDRB akan efisien relatif 100%. Adapun pada sektor lainnya seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga berpengaruh terhadap peningkatan PDRB, karena merupakan sektor dengan penghasil PDRB tertinggi kedua yaitu sebesar Rp. 4.057.040.000. Selanjutnya pada Kabupaten Wonogiri terdapat efisiensi pada output presentase penduduk tidak miskin (PPTM) dan memiliki inefisiensi pada PDRB dan IPM. Dalam hasil analisis DEA memberi target pada PDRB dan IPM agar efisiensi relatif 100%, yang masing-masing target sebesar Rp. 21.873.605.235 dan IPM sebesar 74,4%. Untuk menghasilkan PDRB dan IPM sesuai target, Kabupaten Wonogiri harus meningkatkan dari PDRB aktual sebesar Rp. 4.896.406.235 dan meningkatkan dari IPM aktual sebesar 6,6%. Dalam upaya peningkatan PDRB, Kabupaten Wonogiri dapat meningkatkan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, karena Kabupaten Wonogiri merupakan Kabupaten agraris dengan mayoritas penduduk adalah petani, serta sektor tersebut merupakan sektor dengan penghasil PDRB tertinggi di Kabupaten Wonogiri, yaitu sebesar Rp. 5.477.066.910. Kabupaten Wonogiri juga dapat meningkatkan PDRB melalui sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan

sepeda motor, karena sektor tersebut merupakan sektor dengan penghasil PDRB tertinggi kedua di Kabupaten Wonogiri.

Pada tahun 2016 terdapat dua Kabupaten dengan tingkat efisiensi dibawah 100%, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali. Kabupaten Sragen hanya memiliki satu output inefisiensi yaitu indeks pembangunan manusia (IPM). Untuk mencapai efisiensi relatif 100%, Kabupaten Sragen memerlukan IPM sebesar 73%. Agar memenuhi target 73%, Kabupaten Sragen harus meningkatkan dari IPM actual sebesar 1,6%. Selanjutnya pada Kabupaten Boyolali juga memiliki satu output yang kurang dari relatif 100%, yaitu PDRB. Hasil analisis DEA memberi target PDRB agar mencapai efisiensi relatif 100% sebesar Rp. 21.502.254.293. Untuk memenuhi target tersebut PDRB actual perlu ditingkatkan sebesar Rp. 2.369.698.293. Dalam peningkatan PDRB, Kabupaten Boyolali dapat meningkatkan melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, repara mobil dan sepeda motor, karena mengingat penghasil PDRB tertinggi adalah pada sektor tersebut.

Pada tahun 2017 terdapat dua Kabupaten dengan tingkat efisiensi kurang dari 100%, diantaranya adalah Kabupaten Klaten dan

kabupaten Wonogiri. Masing-masing Kabupaten tersebut hanya memiliki satu output yang efisien relatif 100% yaitu IPM. Kemudian dari hasil analisis olah data DEA, menunjukkan untuk mencapai efisien relatif 100% masing-masing Kabupaten memiliki target. Kabupaten Klaten memiliki target PDRB sebesar Rp. 25.384.990.371 dan PPTM sebesar 87,6%. Untuk mencapai target tersebut, Kabupaten Klaten perlu meningkatkan dari PDRB actual sebesar Rp. 464.687.511 dan sekaligus meningkatkan PPTM sebesar 1,8%. Dalam memenuhi syarat efisiensi 100% tersebut, Kabupaten Klaten dapat fokus pada peningkatan sektor industri pengolahan, karena sektor tersebut merupakan sektor dengan PDRB lapangan usaha terbesar di Kabupaten Klaten, yaitu sebesar Rp. 8.484.614.050. Tidak hanya pada sektor tersebut, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga merupakan penghasil PDRB tertinggi kedua di Kabupaten Klaten, yang dapat berpengaruh terhadap efisiensi 100% pada output PDRB. Selanjutnya Kabupaten Wonogiri memiliki target PDRB agar mencapai efisien sebesar Rp. 22.988.574.829 dan target PPTM sebesar 72,6%. Untuk mencapai efisiensi 100%, perlu meningkatkan dari PDRB actual sebesar Rp. 4.200.177.069 dan meningkatkan PPTM sebesar 3,9%. Jika semua

Kabupaten meningkatkan output sesuai dengan tabel (4.9) maka semua Kabupaten akan efisien relatif 100%.

Menurut data pada tabel (4.9) Kabupaten/ Kota di Karesidenan Surakarta yang memiliki tingkat efisiensi 100% dari tahun 2015 sampai dengan 2017 adalah pada Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar, sedangkan pada Kabupaten lainnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 memiliki inefisiensi dengan tahun yang berbeda-beda. Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta rata-rata memiliki output dengan sektor PDRB tertinggi yang sama yaitu industri pengolahan dan perdagangan besar dan eceran, serta reparasi mobil dan sepeda motor. Sedangkan pada Kabupaten Karanganyar pemasukan PDRB tertinggi adalah pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Kemudian dalam analisis penelitian ini menampilkan *efficient reference set*, yaitu untuk mencapai efisiensi 100% pada daerah yang tidak efisien dapat mengacu pada daerah-daerah yang menjadi *efficient reference set* sesuai dengan daerah yang bersangkutan dan pada periode waktu yang diteliti, berikut adalah tabel yang menunjukkan *efficient reference set*.

Menurut analisis DEA untuk mencapai efisien relatif 100%, maka masing- masing daerah sebaiknya

mengacu pada daerah yang telah ditampilkan berdasarkan tabel diatas. Pada tahun 2015 Kabupaten Sragen memiliki tingkat efisiensi hanya mencapai 84,91% dengan *benchmark* agar mencapai efisien relatif 100% dapat mengacu pada Kabupaten Klaten, Karanganyar, dan Surakarta, dengan masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,009, 0,863 dan 0,099. Kemudian pada tahun 2016, Kabupaten Sragen memiliki peningkatan tingkat efisiensi yaitu sebesar 93,24% dengan *benchmark* agar mencapai efisien relatif 100% dapat mengacu pada Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Surakarta, dengan masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,212, 0,539 dan 0,225. *Multiplier* tersebut berfungsi sebagai angka pengganda yang dinamis sebagai dasar untuk menyesuaikan input dan output Kabupaten Sragen agar mencapai efisien relatif 100% begitupun untuk daerah-daerah lainya yang belum mencapai efisien relatif 100% dapat mencapai efisien dengan merujuk daerah lain berdasarkan multipliernya yang telah ditampilkan berdasarkan analisis DEA. Pada Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan tahun 2015 memiliki tingkat efisiensi mendekati 100%, yaitu sebesar 97,41%. Dalam pencapaian tingkat efisiensi 100%, Kabupaten Sukoharjo perlu merujuk pada Kabupaten Karanganyar dan Surakarta, yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar

0,506 dan 0,521. Pada Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat efisiensi kurang dari 100% terjadi pada tahun 2015 dan 2017. Pada tahun 2015 Kabupaten Wonogiri memiliki tingkat efisiensi mendekati 100% yaitu sebesar 98,93%. Dalam pencapaian efisiensi Kabupaten Wonogiri perlu merujuk pada Kabupaten Klaten dan Kabupaten Karanganyar, yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,383 dan 0,622. Pada tahun 2016 Kabupaten Wonogiri mengalami kenaikan tingkat efisiensi hingga mencapai 100%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali sebesar 98,76%. Penurunan ini dikarenakan terdapat inefisiensi terhadap pengelolaan keuangan, sehingga Kabupaten Wonogiri perlu merujuk pada Kabupaten Boyolali dan Sragen, yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,285 dan 0,720. Pada tahun 2016 juga terdapat Kabupaten Boyolali yang mempunyai tingkat efisiensi kurang dari relatif 100% yaitu sebesar 99,13%, hal ini dapat diatasi dengan mengacu nilai *multiplier* pada beberapa Kabupaten. Kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Surakarta, masing-masing Kabupaten memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,149, 0,608, dan 0,241. Kemudian pada tahun 2017, Kabupaten Klaten juga mempunyai tingkat efisiensi kurang dari 100%, yaitu sebesar

91,91%. Dalam peningkatan tingkat efisiensi menjadi relatif 100%, Kabupaten Klaten perlu mengacu pada Kabupaten Sragen dan Kota Surakarta, yang masing-masing memiliki nilai *multiplier* sebesar 0,863 dan 0,150.

V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) terhadap tingkat efisiensi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di Karesidenan Surakarta pada tahun 2015 sampai dengan 2017, dapat disimpulkan bahwa :

1. Di Karesidenan Surakarta terdapat daerah yang memiliki tingkat efisiensi pendapatan daerah relatif 100% dan dibawah relatif 100%. Daerah yang memiliki tingkat efisiensi relatif 100% pada tahun 2015 adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta, selanjutnya pada tahun 2016 adalah Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta, kemudian pada tahun 2017 adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo,

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta. Daerah dengan tingkat efisiensi dibawah relatif 100% pada tahun 2015 adalah Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sragen, masing-masing memiliki tingkat efisiensi sebesar 97,14%, 98,93%, dan 84,91%. Pada tahun 2016 terdapat Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen yang memiliki tingkat efisiensi sebesar 99,13% dan 93,24%. Pada tahun 2017 terdapat Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri yaitu sebesar 91,91 % dan 98,76%.

2. Efisiensi kurang dari relatif 100% dikarenakan adanya pemborosan terhadap pendapatan daerah. Melalui metode DEA untuk mengatasi Inefisiensi dapat menggunakan dua sisi perbaikan, yaitu dari segi input dan output. Dari segi input dapat melakukan pengurangan input baik dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah, berdasarkan dengan hasil analisis DEA. Sedangkan dari segi output setiap daerah dapat meningkatkan output yaitu PDRB, IPM, dan Presentase penduduk tidak miskin. Kemudian dalam

mengatasi inefisiensi dapat mengacu pada daerah lain yang sudah mencapai efisiensi relatif 100%, acuan tersebut berdasarkan nilai *multiplier* yang telah ditunjukkan dalam hasil analisis DEA

5.2 IMPLIKASI

Diharapkan pada Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat efisiensi relatif 100% untuk mempertahankan efisiensinya. Sedangkan pada Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat efisiensi dibawah relatif 100% diharapkan untuk mengevaluasi pengelolaan pendapatan daerah (input) agar tidak terjadi pemborosan dan tepat sasaran dalam pengalokasiannya. Kemudian daerah dengan efisiensi dibawah 100% juga harus meningkatkan dari segi output yaitu PDRB, IPM, dan presentase penduduk tidak miskin, hal ini dilakukan agar tercapainya pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam meningkatkan efisiensi Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo dapat merujuk pada Kabupaten Karanganyar dan Kota Surakarta. Kemudian pada Kabupaten Wonogiri dapat merujuk pada Kabupaten Klaten dan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Boyolali dapat merujuk pada Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Surakarta.

Selanjutnya Kabupaten Klaten dapat merujuk pada Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen.

DAFTAR PUSTAKA

- Lincoln, Arsyad. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN
- Lincoln, Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : BPFE
- Sukirno, Sadono. 2012. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : Erlangga
- BPS. 2016. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah 2011-2015*. BPS Jawa Tengah
- Ega, Yanitra. 2012. *Efisiensi Sektor Publik Pendekatan Data Envelopment Analysis Indonesia 2001-2008*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Semarang. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tri Wahyu. 2017. *Determinasi Efisiensi Sektor Publik Dalam Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Bali*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Yogyakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
- Merini, Dian. 2013. *Analisis Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Sektor Publik di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Ilmiah FEB UB.
- Chusnah, Saidatul. 2014. *Efisiensi Sektor Publik dan Kinerja Ekonomi Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa Timur)*. Malang. Jurnal Ilmiah FEB Universitas Brawijaya
- Saputra, Putu Mahardika Adi. 2011. *Analysis of Technical Efficiency of Indonesian Manufacturing Industries: An Application of DEA*. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 Issue 66.

- Ismail, Idham. 2009. Analisis Efisiensi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat Tahun 2005 – 2008 : Pendekatan Efisiensi Stochastic Frontier. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Daerah: Pendekatan Error Correction Model. Jurnal Ekonomi Pembangunan
- Erwinta Siswadi dan Nugroho. 2005. Paradigma Baru Pengukuran Efisiensi Kinerja Relatif Berbasis Pendekatan Matematik. Jakarta : Majalah Usahawan No. 06 Tahun XXXIV
- Muharam, Hajum. 2005. Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam , II (3). pp. 80-166
- Kartasamita, Ginandjar. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat; Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta. CIDES
- Yayuk Eko Wahyuningsih, Zamzami. 2014. Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia. ISSN. 2442-7411
- Susanti, Susy. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel. Jurnal Matematika Integratif ISSN 1412-6184
- Oktaviana, Dewi. 2012. Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi

